



Kemitraan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi pada program sekolah lapangan kakao

N. Novianti^{1*}, Yoyon Suryono¹, Puji Yanti Fauziah¹

¹ Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta 55281, Indonesia

* Corresponding Author. Email: mce.vie21@gmail.com

Received: 16 November 2015; Revised: 5 December 2017; Accepted: 2 July 2018

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program, bentuk kemitraan yang dilakukan LSM, pemberdayaan ekonomi yang terjadi, dan bentuk pengembangan dalam rangka keberlanjutan pada program Sekolah Lapangan Kakao yang terjadi di kampung Kalifam. Penelitian menggunakan metode studi kasus, pengumpulan data dengan wawancara kepada informan bersifat *purposive sampling* yakni peserta program tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan LSM, dan mitra yang terlibat dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program, mulai dari tujuan, proses dan hasil kegiatan dinilai baik. Proses kemitraan juga yang dilakukan mendapat penilaian yang baik dari pihak-pihak yang terlibat yaitu LSM sebagai inisiator program, unsur-unsur masyarakat sebagai peserta program, gereja selaku motivator masyarakat dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) selaku fasilitator; pemberdayaan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terjadi walaupun masyarakat telah berdaya di level pengetahuan dan keterampilan budidaya kakao; pengembangan program yang diharapkan mulai dari komitmen peserta terhadap keterampilan, proses pendampingan, kebun percontohan, dan pelatihan teknologi pengolahan hasil.

Kata Kunci: kemitraan, pemberdayaan ekonomi, sekolah lapangan, kakao

Nongovernment organization's partnership as part of economic empowerment on cacao's farmer's field school

Abstract

The study aims to describe the implementation of the program, forms of partnership done by NGO, the economic empowerment, and other forms of development in the context of sustainability at Cocoa's Farmer's Field School program that took place in the Kalifam village. This qualitative research used the case study method; with data collection used the interview to the informant with the purposive sampling characteristic which are program's participants: traditional and community leader, NGO's representatives, and partners involved in the program. The results showed that the implementation of the program, ranging from the purpose, process and results of activities considered good; the partnership also conducted gets a good assessment of the parties involved, which are the NGO as the initiator of the program, the elements of society as a participant of the program, the church as a community motivator and PPL as a facilitator; economic empowerment has not fully occurred even though the community empowerment has been revealed in the level of knowledge and skills of cocoa cultivation; the program developments expected are start from the participants' commitment to the skills, process assistance, cacao's model plantation, and the training of technology processing.

Keywords: *partnership, community's economic empowerment, farmer's field school, cacao*

How to Cite: Novianti, N., Suryono, Y., & Fauziah, P. (2018). Kemitraan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi pada program sekolah lapangan kakao. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 74-84. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v5i1.7049>



<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v5i1.7049>

PENDAHULUAN

Pembangunan salah satunya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum seperti amanat Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, pembangunan harus diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan fisik semata. Kualitas manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir sampai dengan 2013, IPM terendah diduduki oleh provinsi Papua yakni 0.66 dari skala 1 (data IPM 2008-2013, BPS). Pembangunan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan yang holistik juga dapat terlihat dari angka *ratio gini* atau pemerataan pembangunan. Angka *ratio gini* juga menunjukkan bahwa Papua menduduki peringkat terendah se-Indonesia, yakni 0,443 dari skala 1, yang berarti pembangunan yang terjadi di Papua paling tidak merata (data *ratio gini*, BPS).

Data IPM dan *ratio gini* yang menyatakan Papua adalah peringkat terakhir dari seluruh provinsi di Indonesia, artinya pembangunan manusia di Papua belumlah maksimal karena ketidakmerataan pembangunan pun masih tinggi terjadi. Hal paling nyata untuk hal ini adalah kondisi kemiskinan masyarakat Papua yang berbanding terbalik dengan potensi sumber daya alam yang besar yang ada di daerah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas manusia dan pemerataan pembangunan ini, pembangunan berorientasi manusia berdasar pemberdayaan sangat penting dilakukan. Pembangunan berorientasi manusia atau *people-centered development* adalah dasar perubahan yang sesuai dengan konsep pemberdayaan.

Keerom adalah salah satu Kabupaten yang terletak di utara provinsi Papua. Secara topografi, Kabupaten ini merupakan lahan miring sebesar 53,2%, sisanya lahan datar dan rawa. Penggunaan tanah terbesar di Kabupaten Keerom adalah sebagai hutan lindung. Kabupaten ini memiliki iklim tropis basah karena curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Mata pencaharian utama masyarakat adalah dengan bertani. Hal ini terkait dengan topografi daerah dan potensi alamnya.

Keerom memiliki potensi perkebunan yang menjanjikan, yakni sebesar 28% (Keerom dalam Angka, data BPS). Salah satu produk perkebunan yang menjanjikan adalah kakao atau coklat. Setiap tahun, Kabupaten Keerom menghasilkan 500 ton kakao (data potensi sumber daya alam, BPS Keerom). Namun demikian, hasil ini menjadi kondisi paradoks jika dihadapkan pada potensi yang sebenarnya dimiliki daerah ini. Kondisi yang paradoks ini seharusnya dapat ditingkatkan jika petani memiliki pengetahuan dan keterampilan budidaya kakao. Kemiskinan sumber daya manusia menjadi masalah besar yang harus segera disiasati, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi awal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang lainnya, termasuk di bidang ekonomi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lebih dikenal dengan lembaga sosial yang merupakan lembaga nonpemerintah dan nonprofit. Lembaga ini yang telah lama bergerak melakukan kerja-kerja kemanusiaan berbasis pengembangan masyarakat yang berusaha meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki daya dari kondisi ketidakberdayaan. Secara definitif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat, yang secara sukarela bergerak di kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Zubaedi, 2013, p. 91).

Di Kabupaten Keerom, salah satu LSM yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat adalah Wahana Visi Indonesia (WVI). Salah satu aktivitas program yang mengusahakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu Sekolah Lapangan (SL) Kakao yang ditujukan untuk masyarakat petani kakao di salah satu kampung penduduk asli Papua bernama Kalifam. Konsep SL Kakao diterapkan dengan didasari oleh konsep pemberdayaan di bidang pendidikan. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya un-

tuk terus menerus memperbaiki kehidupan (Mardikanto & Soebiato, 2013, p. 33).

Pemberdayaan adalah usaha untuk menaikkan kekuatan dari pihak yang lemah (Ife, 1997, p. 56). Pemberdayaan adalah bagian dari suatu bentuk pembangunan yang berpusat pada manusia (Soetomo, 2014, p. 24) yang mengarahkan masyarakat memiliki daya atau kekuatan untuk menggerakkan dirinya sendiri mencapai kemandirian, atau yang disebut dengan keswadayaan (Soetomo, 2012, p. 11). Sekolah lapangan adalah metode pendidikan bagi masyarakat yang ditujukan untuk membahas masalah yang dirasakan petani, berbagi pendapat ber-dasar pengalaman tentang permasalahan tersebut berdasarkan sumber daya yang dimiliki bersama (Mardikanto & Soebiato, 2013, p. 204). Tujuan besarnya adalah agar dengan pendidikan yang diterima lewat sekolah lapangan ini, masyarakat memiliki daya untuk mengusahakan kekuatannya sendiri sehingga tercipta keswadayaan di dalam dirinya.

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi, perlu partisipasi berbagai pihak. LSM Wahana Visi Indonesia ini mengambil peran fasilitatif dan teknis untuk menjadi aktor perubahan dalam kondisi ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini. Setidaknya ada empat peran yang perlu dijalankan oleh pelaku perubahan menurut Ife (1997), yaitu peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis (Adi, 2008, p. 89). Saat ini, yang terjadi adalah para pelaku perubahan tersebut berjalan sendiri-sendiri dengan program masing-masing yang sering kali belum sinergis. Hal ini menjadi citra kemitraan yang terjadi di masyarakat, yakni banyak lembaga namun tersekat-sekat dan tidak menyatu dalam menggali kekuatan untuk tujuan bersama yang lebih besar.

LSM Wahana Visi Indonesia meng-gagas kemitraan dalam program SL Kakao ini dalam rangka mewujudkan tujuan program pemberdayaan. Fokus penelitian ini adalah tentang sinergitas kemitraan yang belum terjadi di tingkat program yang digagas oleh LSM. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian ini terkait dengan implementasi program, bentuk kemitraan yang dibangun

oleh LSM, bentuk pemberdayaan ekonomi yang terjadi, dan tentang bentuk pengembangan yang dapat mendukung keberlanjutan program Sekolah Lapang (SL) Kakao. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang implementasi, bentuk kemitraan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bentuk pengembangan dari program SL Kakao.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif studi kasus. Penelitian dilakukan di bulan Februari sampai dengan Mei 2015 di kampung Kalifam, Kabupaten Keerom, Papua.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki pengetahuan paling baik mengenai topik penelitian, yaitu perwakilan petani yang terlibat dalam program, perwakilan LSM pelaksana, dan mitra-mitra yang terlibat dalam program tersebut.

Subjek penelitian ditentukan melalui purposif proses pendaftaran pihak-pihak yang terkait dengan program dan juga yang mengetahui konteks masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, subjek penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan langsung dan analisa dokumen program. Instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisa data menggunakan model interaktif Huberman dan Miles dimana terjadi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Denzin dan Lincoln, 2009, p. 592). Proses analisis data dilakukan sejak awal proses desain penelitian, dimana dalam proses awal data dianalisis untuk mengetahui data apa lagi yang mesti dicari dan didalami. Di pertengahan proses, data dianalisis kembali untuk pemeriksaan keabsahan data. Terjadi proses verifikasi yang menilai keabsahan data dengan proses triangulasi dan kecukupan referensi. Proses verifikasi melibatkan interpretasi atas data yang tersaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi program,

bentuk kemitraan yang terjadi, bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bentuk pengembangan yang diharapkan untuk keberlanjutan program.

Implementasi Program

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom, terdapat 42 hektar saja area yang menghasilkan kakao untuk seluruh distrik Waris. Dalam setahun, dari seluruh distrik (kecamatan) Waris baru menghasilkan 14 ton atau 14.000 kilogram. Data ini menunjukkan bahwa total area dan produksi yang baru dihasilkan tidak sebanding dengan luas area yang seharusnya bisa ditanami kakao (Waris dalam Angka, 2014).

Data lainnya adalah bahwa masyarakat tidak cukup mampu mengelola potensi tersebut akibat minimnya kapasitas secara pengetahuan. Minimnya kapasitas ini terkait dengan ketertinggalan informasi teknologi karena akses daerah yang sulit. Kapasitas menjadi poin penting karena masyarakat menggantungkan kehidupannya pada kakao sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, tujuan program sekolah lapangan kakao ini juga terkait dengan kondisi hama kakao yang merajalela dirasakan oleh masyarakat. Dari kondisi-kondisi tersebut maka didapat bahwa tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat disisi pengetahuan dan keterampilan perawatan kakao.

Data-data di atas menguatkan konsep tentang sekolah lapangan yang berkembang sebagai suatu pendekatan untuk melakukan manajemen terpadu pada hama atau *Integrated Pest Management- IPM* (van den Berg, 2004, p. 4). Sekolah lapangan sejak awal dijalankan di sekitar tahun 80-an memiliki tujuan untuk membantu petani dalam menyelesaikan masalah hama yang dialami oleh petani. Biasanya petani menggunakan pestisida untuk persoalan hama tanaman, namun di sekolah lapangan, petani diajarkan tentang cara-cara mengurangi ketergantungan mereka pada pestisida, sehingga hasil tanamannya lebih bersifat organik. Dengan memiliki pengetahuan tentang pengendalian hama dan penggunaan pestisida, diharapkan petani dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas tanaman yang mereka budidayakan.

Terkait kualitas, biji kakao yang dinyatakan berkualitas salah satunya jika memiliki ciri-ciri masak penuh, terfermentasi dengan baik (kering, berwarna coklat, berbau asam, tidak terdapat *purple* dan *slaty* ketika dibelah).

Sekolah lapangan juga memiliki tujuan untuk memberdayakan petani sampai dengan membantu petani mengorganisasikan diri dan komunitasnya dengan pengetahuan dan keterampilan, membuat petani ahli di lahan sendiri (Ombati, et.al., 2010, p. 1). Pemberdayaan yang dilakukan dalam program sekolah lapangan ini bersifat pemberdayaan di bidang pendidikan, yakni dengan memberikan kapasitas berupa pengetahuan dan keterampilan kepada petani tentang segala hal yang mereka perlukan dalam hal budidaya kakao. Menurut Ombati, et.al. (2010) dalam teorinya, pengetahuan dan keterampilan tersebut akan menjadikan petani-petani tersebut menjadi ahli di lahannya sendiri sehingga tidak lagi bergantung pada pihak lain, misalnya para penyuluh lapangan.

Proses implementasi didasari oleh hasil evaluasi kegiatan pemasaran kakao bersama yang menyatakan tentang minimnya kapasitas masyarakat terhadap budidaya kakao. Kapasitas yang minim itu berbanding terbalik dengan potensi kakao yang besar yang dimiliki masyarakat, sehingga pemilihan metode sekolah lapangan pun terkait dengan hal tersebut. Sekolah lapangan dinilai dapat menjadi jembatan yang baik untuk menjawab persoalan kapasitas masyarakat yang minim dan pemanfaatan potensi yang besar yang dimiliki masyarakat di kebun kakao mereka.

Sekolah lapangan kakao di kampung Kalifam berlangsung selama tiga hari tanggal 19-21 Maret 2014 dengan memberikan materi dan praktik langsung di kebun kakao milik petani, sehingga masyarakat langsung mengalami materi-materi yang diajarkan. Materi-materi yang diajarkan antara lain mengenai ekosistem dan agrosistem kebun kakao, tentang perawatan tanaman berupa kegiatan pemangkasan dan pemupukan tanaman, sanitasi dan pengendalian hama penyakit, pengetahuan tentang panen dan pasca panen dan teknik sambung samping dan sambung pucuk untuk produksi kakao.

Proses kegiatan sekolah lapangan adalah proses *learning by doing* yaitu pembelajaran dengan langsung melakukan praktik langsung. Saroni (2012, p. 99) menyatakan bahwa sekolah lapangan adalah kegiatan belajar-mengajar atau pendidikan masyarakat yang diadakan langsung di bidang kerja yang dipelajari, materi bersifat aplikatif. Sekolah lapangan memiliki topik yang beragam: konservasi sampai dengan peningkatan pendapatan petani; bersifat *learning by doing*; forum melakukan debat berdasarkan pengalaman, eksperimen dan informasi lain di luar komunitas petani (Ombati, et.al., 2010, p. 1). Kedua konsep ini menyatakan bahwa proses implementasi yang dilakukan dalam SL Kakao di kampung Kalifam telah sesuai dengan kerangka konsep tentang sekolah lapangan.

Nilai-nilai positif yang terjadi dalam implementasi antara lain respon peserta yang baik terhadap materi yang diberikan, antusiasme masyarakat (termasuk tokoh-tokoh di masyarakat) untuk mengikuti kegiatan, dan hasil dari pengetahuan dan keterampilan baru yang mereka dapat dengan buah kakao yang lebih banyak dari biasanya. Antusiasme masyarakat untuk terlibat terbukti dengan terlibatnya 27 orang sebagai peserta dari 20 orang yang ditargetkan oleh pelaksana program. Nilai positif berupa antusiasme peserta untuk terlibat dalam kegiatan ini dan respon yang baik terhadap materi-materi yang diberikan sangat sejalan dengan konsep yang digulirkan oleh Ombati et.al. (2010) bahwa sekolah lapangan terdiri dari sekelompok petani yang tergabung dan tertarik untuk belajar topik tertentu tentang pertanian. Masyarakat memiliki ketertarikan terhadap kegiatan ini karena kegiatan ini dapat menjadi solusi dari permasalahan budidaya kakao yang dirasakan oleh masyarakat saat itu.

Nilai negatif yang diungkapkan adalah waktu pelaksanaan yang dirasa kurang, keluhan mengenai tidak adanya “uang duduk”, dan komitmen masyarakat yang kurang untuk tekun melakukan perawatan akibat kurangnya pendampingan. Pendampingan dan keluhan “uang duduk” ini adalah tantangan yang harus disikapi oleh penyelenggara program atas keberlanjutan program

sekolah lapangan. “Uang duduk” menjadi tantangan sangat besar pada konteks masyarakat Papua saat ini, terutama sejak digulirkannya Otonomi Khusus (Otsus). Maka dari itu, pendampingan kepada masyarakat dapat berguna untuk membangun kesadaran terhadap situasi masyarakat yang sering berharap pada hal-hal berbau materi seperti “uang duduk”. Pendampingan juga menjadi tantangan dalam konteks program SL Kakao ini, karena di satu sisi pendampingan dapat memberikan semangat bagi para peserta SL Kakao untuk semakin mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sebagai petani kakao sehingga mereka berdaya. Namun, di sisi yang lain, pendampingan dapat melenakan para peserta sehingga tidak memiliki kemandirian.

Sekolah lapangan adalah bentuk dari pendidikan orang dewasa yang menjadi ruh dari pendidikan luar sekolah. Van den Berg (2014) menyatakan bahwa “*the farmer field school is a form of adult education, which is evolved from the concept that farmers learn optimally from field observation and experimentation*”. Selain itu Knowles, Holton, & Swanson (2004, pp. 64-69) menyatakan bahwa orang dewasa mengarahkan orientasi belajarnya pada hal-hal yang berpusat pada hidup (*life-centered*), atau tugas (*task-centered*), atau suatu masalah (*task-centered*). Kondisi-kondisi yang didapat dalam implementasi program menunjukkan hal-hal sesuai dengan konsep pendidikan orang dewasa ini.

Kemitraan Program

Turunan dari poin ini adalah tentang pihak-pihak yang terlibat dalam program, identifikasi inisiator kemitraan, proses inisiasi kerja sama, tujuan kemitraan, peran-peran dalam kemitraan yang terjalin, nilai positif dan negatif dalam kemitraan dan faktor belum sinerginya kemitraan antara LSM dan para mitra.

Berdasarkan hasil wawancara, didapat data bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, antara lain tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama (salah satunya adalah lembaga gereja); pihak Petugas Penyuluh Lapangan; dan LSM sendiri sebagai inisiator program. Proses

inisiasi kemitraan dilakukan dengan merancang program bersama masyarakat dan tokoh-tokoh dengan dasar evaluasi program pemasaran bersama kakao. Setelah merancang program, LSM membangun komunikasi dengan para tokoh kunci di masyarakat dan pihak-pihak terkait seperti PPL.

“Partnership are made up of stakeholders; that is, those who have stake or interests in the partnership” (Blackshaw, 2010, p. 172). Para pihak yang terlibat dalam kegiatan sekolah lapangan ini adalah *stakeholders* yang memiliki kepentingan dan ketertarikan dalam program sehingga bersedia menjadi mitra. Dalam proses inisiasi, pihak inisiator program, yakni LSM Wahana Visi Indonesia mengajak pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan ketertarikan tersebut untuk berpartisipasi sebagai mitra, termasuk mereka yang menjadi penerima manfaat program seperti masyarakat. Hal ini membuktikan teori Paul (1987) bahwa kemitraan erat dengan partisipasi, dimana terjadi proses aktif dari penerima manfaat mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pengembangan ketimbang hanya menerima hasil dan manfaat (Nasdian, 2014, p. 90).

Dari proses program ini, tujuan dari kemitraan yang digagas ini adalah untuk membuat sistem informasi dan jaringan terkait dengan kakao yang bersifat *sustain* atau berkelanjutan. Terkait sistem informasi, Mitchell, et.al menyatakan bahwa tujuan kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi pertukaran informasi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pengembangan masyarakat setempat yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan (Mardikanto & Soebiato, 2013, p. 158). Blackshaw (2010, p. 171) menyatakan *“partnership was seen as a way of boosting sustainability; improvements facilities and services; generating the critical mass need to drive through initiatives; making services relevant to the whole community; and drawing complementary services”*. Dengan terciptanya sistem informasi, terbentuk jaringan yang akan secara konsisten bergerak di bidang pengembangan kakao yang akhirnya mengarah pada keberlanjutan program sekolah lapangan ini kepada

bentuk-bentuk pengembangan program lainnya yang dapat memberdayakan masyarakat terutama di bidang ekonomi.

Peran yang disepakati oleh masing-masing pihak yang terlibat adalah: LSM sebagai inisiator dan penanggungjawab penuh atas pendanaan, tokoh-tokoh masyarakat (termasuk gereja) yang terlibat sebagai mitra memegang peran sebagai motivator bagi masyarakat umum untuk terlibat, dan pihak PPL berperan sebagai fasilitator yang memberikan materi dan praktik kepada peserta. Kemitraan membutuhkan kontribusi, karena kemitraan adalah *joint working arrangements*. (Blackshaw, 2010, p. 170). Mitchel, et.al juga menyatakan terkait dengan kontribusi, bahwa tujuan kemitraan lainnya adalah memfasilitasi kegiatan, terutama yang bersifat teknis (Mardikanto & Soebiato, 2013, p. 158). *Joint working arrangements* yang digagas dalam kemitraan ini salah satunya melibatkan pihak fasilitator yang berperan memfasilitasi hal-hal teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Nilai positif dari kemitraan ini adalah komitmen dari para mitra untuk melakukan peran masing-masing, komunikasi yang baik yang dilakukan oleh LSM, dan terjadi *sharing resources* dimana PPL merasa terbantu dalam melaksanakan tugas penyuluh-annya dengan dukungan dana yang dikeluarkan oleh LSM. Sebagai *joint working arrangements*, maka kriteria mitra adalah: sama-sama organisasi independen, setuju untuk bekerja bersama mencapai tujuan yang sama, menciptakan struktur dan proses organisasi baru, merencanakan program bersama, berbagi informasi relevan, meng-ambil risiko dan manfaat dari program (Blackshaw, 2010, p. 170). Kemitraan yang digagas LSM ini sejalan dengan kriteria mitra yang kedua, yakni setuju untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Komitmen yang ditunjukkan oleh para pihak yang terlibat dalam kemitraan ini adalah suatu bentuk dari pernyataan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut Miradj & Sumarno (2014), terdapat 4 syarat, yaitu harus memiliki kesamaan visi-misi, membangun kepercayaan, saling menguntungkan antar mitra, dan menjaga efisiensi dan efektivitas dalam

proses untuk mencapai hasil yang ingin dicapai. Kemitraan yang baik adalah jika setiap pihak dengan penuh kesadaran mengajukan diri dengan peran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masalah. Namun dalam konteks penelitian ini, komitmen melakukan peran adalah bagian kesadaran yang menjadi keberhasilan kemitraan yang digagas LSM Wahana Visi Indonesia.

Nilai negatif yang terjadi dalam kemitraan ini adalah tidak terjalannya kemitraan dengan pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah dinilai kurang memiliki kapasitas yang dibutuhkan dalam teknis program untuk menjadi fasilitator sesuai kebutuhan program, dan tidak fleksibelnya pemerintah untuk menjadi mitra karena sangat berpatokan dengan dokumen administratif. Kemitraan yang terjadi telah mendapat penilaian yang baik dari seluruh pihak yang terlibat selain dari LSM. Salah satu yang terjadi dalam kemitraan ini yang menyebabkan kurangnya sinergitas yang diharapkan adalah dominasi peran LSM selaku inisiator program. Dominasi peran ini terkait dengan tanggung jawab LSM terkait dengan pendanaan yang keseluruhannya ditanggung oleh pihak LSM. Ketika kemitraan seharusnya dapat menjadi ajang *sharing resources*, kemitraan dalam program ini belum sampai pada tahap berbagi sumber daya secara material, walaupun hal itu dapat diusahakan dengan lebih baik.

Tantangan bekerja bersama antara lain cara berpikir tradisional, peran berlebihan, pertarungan kekuasaan, kurang rasa kepemimpinan (Ayres & Silvis, 2011, pp. 159-160). Sejalan dengan pendapat itu Blackshaw (2010, p. 173) menyatakan bahwa kegagalan terbesar untuk kemitraan berjalan dengan baik adalah isu tentang kekuasaan. Proses pemberdayaan yang sangat terkait dengan memberi "power" kepada yang pihak yang tidak berdaya, akan menjadi terkendala jika para pelaku pemberdayaan justru terbentur dengan isu kekuasaan di antara mereka. Blackshaw juga menyatakan bahwa kurang fleksibelnya suatu instansi untuk melakukan kerja-kerja kemitraan salah satunya adalah karena tantangan lintas isu atau tema (*cross-cutting issue or theme*), walau sebenarnya kemitraan dapat mengurangi *overlap* dan duplikasi

proses jika setiap pihak dapat berperan dalam konteks isu yang terkait, walaupun tidak persis sama. Dalam konteks program SL Kakao ini contohnya adalah ketika mengaitkan "petani kakao" dengan "petani" yang sifatnya lebih umum.

Berdasarkan data yang didapat, secara keseluruhan proses kemitraan dinilai berhasil oleh para informan yang terlibat dalam program. Salah satu indikasinya adalah karena program yang dijalankan berjalan dengan baik. Mardikanto dan Soebiato (2013) menyatakan bahwa kerja-kerja kemitraan akan berhasil jika didasari rasa saling ketergantungan, saling membutuhkan dan memperkuat. Mayo dan Craig (1995) menyatakan bahwa kemitraan yang mengarah pada suatu keberlanjutan harus menjalankan strategi kembar yaitu partisipasi dan pemberdayaan. Kedua hal tersebut dapat mengembangkan pengembangan berbasis manusia (*people-centered development*), kesempatan yang sama (*equal opportunities*) dan keadilan sosial (Samah & Aref, 2009, p. 1).

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau suatu ketidakmanfaatan menjadi bermanfaat (Ife, 1997). Di Indonesia, pemberdayaan (*empowerment*) terkait dengan istilah pengentasan kemiskinan yang digulirkan sejak tahun 1993 berdasarkan Instruksi Presiden No. 5/1993 (Mardikanto & Soebiato, 2013). Pemberdayaan juga dinyatakan dalam terminologi beragam lainnya yaitu kekuatan diri, kontrol, kemandirian diri, pilihan pribadi, dan seterusnya (Narayan, 2002, p. 14).

Berdasarkan hasil wawancara, pemberdayaan dari sisi kapasitas masyarakat dalam perawatan kakao telah terjadi. Artinya masyarakat telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan kakao, walau belum semua peserta yang terlibat mempraktikkan materi yang telah mereka dapatkan. Pemberdayaan adalah pengembangan aset dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya (Narayan, 2002, p. 14). Aset dalam penelitian ini adalah potensi kakao yang ada di lingkungan hidup masyarakat di kampung Kalifam, sedangkan kemampuan adalah

potensi diri masyarakat itu sendiri terutama di sisi pengetahuan dan keterampilan. Pemberdayaan terjadi ketika potensi yang ada di masyarakat tersebut dapat dioptimalkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam proses yang telah ditempuh oleh masyarakat sejak pelaksanaan kegiatan SL Kakao sampai dengan penelitian dilakukan, potensi yang ada di masyarakat berangsur-angsur dapat diberdayakan dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat sebagai hasil dari proses program SL Kakao.

Pemberdayaan juga terkait dengan pilihan metode yang dipakai untuk memberdayakan. Sekolah lapangan menjadi jalan pemberdayaan pada masyarakat kampung Kalifam. Hal ini sejalan dengan kerangka konseptual sekolah lapangan yang memiliki tujuan untuk memberdayakan petani dengan pengetahuan dan keterampilan (Ombati, et.al., 2010). Artinya, sekolah lapangan menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu pengembangan kapasitas mereka di bidang pengetahuan dan keterampilan budidaya kakao.

Menurut Ife (1997, p. 59), perspektif kekuasaan memiliki empat perspektif yaitu pluralis, elit, struktural, dan post-struktural. Metode sekolah lapangan sangat sejalan dengan pendekatan post-struktural, dimana pendekatan pemberdayaan yang digunakan adalah untuk mengubah metode lama yang *old-fashioned*, mengembangkan pengertian baru yang berdasar pada apa yang diinginkan yang lebih bersifat subjektif, dan melakukan pendidikan yang membebaskan (*liberation education*). SL Kakao menjadi pilihan tepat dari metode belajar mengajar yang bersifat *learning by doing*, pendidikan yang membebaskan warga belajar dari ruang-ruang kelas yang tidak efektif dengan memberikan ruang lain yang sangat mereka kenali yaitu kebun kakao mereka sendiri. Dengan belajar langsung di lokasi dimana mereka melakukan kegiatan harian mereka untuk mencari nafkah, mereka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual dan harapannya mereka dapat menjadi ahli di kebunnya sendiri.

Pemberdayaan ekonomi jelas amat terkait dengan peningkatan kesejahteraan

ekonomi masyarakat. Berdasarkan data yang didapat, dari sisi ekonomi telah terjadi kenaikan harga kakao yang dirasakan oleh salah satu informan. Kenaikan harga ini sangat signifikan yakni dari Rp 15.000,00 per kilogram menjadi Rp 33.000,00 per kilogram. Hal ini dapat karena informan tersebut benar-benar mempraktikkan keterampilan dalam perawatan kakao dan melakukan teknik-teknik untuk memasarkan kakao hasil produksinya. Namun di lain sisi, didapati pula informan yang merasa belum mendapatkan hasil yang signifikan dari sekolah lapangan yang diikutinya. Hama dan harga kakao yang tidak tetap menjadi alasan mengapa informan tersebut belum melihat hasil dari sekolah lapangan yang diikutinya.

Pemberdayaan seharusnya terkait dengan pemberdayaan ekonomi ekonomi rakyat (Theresia, Andini, Nugraha, & Mardikanto, 2014, p. 94). Jadi, walaupun belum terjadi sepenuhnya, telah ada informan yang merasakan pemberdayaan ekonomi tersebut. Pembelajaran berikutnya adalah agar lebih banyak pihak yang dapat merasakan pemberdayaan secara ekonomi, dimulai dengan secara konsisten melakukan perawatan kakao sehingga ancaman hama dapat diminimalisir dan dengan demikian dapat meningkatkan harga jual kakao kepada pembeli. Hal ini terkait akan sangat terkait dengan pendampingan yang menjadi poin negatif dalam implementasi program.

Persoalan tentang mengusahakan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat memang tidaklah mudah. Penyelenggara program menyatakan bahwa sulit untuk menaikkan batasan atau patokan harga kakao. Hal ini disebabkan salah satunya karena sulit menemukan pembeli kakao yang mau bekerja bersama untuk membeli langsung dari masyarakat. Hal lainnya adalah karena belum adanya regulasi pemerintah tentang patokan harga kakao, sehingga tengkulak dengan sangat mudahnya memasang harga kepada penjual yakni para masyarakat penghasil kakao. Terkait dengan penelitian ini yang menghubungkan antara kemitraan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, belum terlihat bahwa kemitraan yang terjadi dalam program SL Kakao berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi ma-

syarakat. Pihak LSM Wahana Visi Indonesia belum dapat menghubungkan para pembeli (*buyer*) kakao potensial kepada masyarakat, dan selain itu belum dapat menjangkau pemerintah yang dapat memengaruhi otorisasi harga kakao.

Asian Development Bank menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berhasil jika bersifat komprehensif dan memuat lima karakteristik: berbasis lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis kemitraan, holistik, dan berkelanjutan (Zubaedi, 2013, p. 76). Sulistiati menyatakan konsep kesejahteraan yang diharapkan adalah kesejahteraan yang meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan sosial dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual, maupun sosial (Wesa & Suryono, 2014). Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi Indonesia dalam program sekolah lapangan kakao ini telah berusaha melakukan lima prinsip dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Keberlanjutan Program

Kemitraan memiliki tujuan untuk keberlanjutan dari apa yang telah dilakukan. Pelibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan ketertarikan pada isu yang diangkat dalam kerja bersama tersebut adalah cara untuk memastikan bahwa apa yang telah dikerjakan tidak akan sia-sia. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, diharapkan memunculkan rasa kepemilikan yang besar terhadap kegiatan yang dirancang bersama dan semangat melanjutkan apa yang telah mulai dikerjakan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para informan berharap banyak pada sekolah lapangan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Beberapa bentuk pengembangan yang diharapkan antara lain adalah: (1) patokan harga kakao yang jelas sehingga masyarakat dapat memasarkan hasil produksi kakao mereka dengan baik, (2) komitmen para petani eks-partisipan program untuk melakukan keterampilan dalam perawatan kakao, (3)

pendampingan dari pihak PPL dan LSM kepada masyarakat karena sangat berhubungan dengan komitmen mereka, (4) realisasi kebun percontohan yang digagas LSM bekerjasama dengan gereja, (5) pembentukan sentra kakao dan harapan akan kapasitas untuk teknologi pengolahan hasil, dan (6) peningkatan kapasitas pemerintah.

Dalam rangka keberlanjutan, Ebewore (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pentingnya *knowledge sharing* antara petani kakao, baik yang terlibat dalam sekolah lapangan atau tidak untuk meningkatkan praktik budidaya kakao. Kegiatan berbagi pengetahuan ini penting untuk memastikan efektivitas sekolah lapangan yang diikuti petani dan sangat mempermudah kegiatan pendampingan pasca kegiatan.

SIMPULAN

Program Sekolah Lapangan (SL) Kakao yang dilaksanakan pada 19-21 Maret 2014, secara keseluruhan mendapat penilaian yang baik dari berbagai pihak yang terlibat. Program ini memiliki tujuan utama untuk memberi pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat petani kakao dalam hal budidaya kakao. Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan antara lain tentang ekosistem dan agrosistem, pemangkasan dan pemupukan tanaman, sampai dengan teknik produksi sambung samping dan sambung pucuk. Implementasi program ini menggunakan prinsip *learning by doing* seperti dasar prinsip pembelajaran orang dewasa dan pendidikan luar sekolah.

Kemitraan dalam program SL Kakao ini secara keseluruhan juga mendapatkan penilaian yang baik. Terdapat empat pihak yang terlibat di dalam kerja sama yaitu pihak LSM Wahana Visi Indonesia selaku inisiator dan penyelenggara program, unsur-unsur masyarakat kampung, pihak gereja selaku mitra yang giat berperan sebagai motivator bagi masyarakat, dan pihak petugas penyuluh lapangan (PPL) yang berperan sebagai fasilitator. Tujuan kemitraan yang dibangun adalah agar tercipta sistem informasi dan jaringan yang mengarah pada *sustainability* program.

Sekolah Lapangan Kakao telah menghasilkan proses pemberdayaan di tengah masyarakat dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya kakao. Kemitraan yang dijalankan dalam prosesnya telah sesuai dengan konteks pemberdayaan yang diharapkan. Namun demikian, kemitraan yang terjadi belum sepenuhnya berdampak dan memengaruhi pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Hal ini karena belum terjalannya kemitraan dengan pemerintah yang dapat menjadi otoritas regulasi harga kakao.

Bentuk keberlanjutan yang diharapkan oleh para pihak terhadap program SL Kakao ini antara lain pendampingan kepada masyarakat terkait komitmen masyarakat untuk terus melakukan perawatan kakao, peningkatan kapasitas pihak pemerintah, regulasi harga dalam rangka pemasaran hasil produksi kakao, realisasi kebun percontohan, perwujudan sentra kakao, dan pelatihan pengolahan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi komunitas, pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ayres, J. S., & Silvis, A. H. (2011). *Principles of working together, developing relationships that support community development initiatives*. Dalam Robinson Jr. J.W. & Green, Gary P (Ed.). *Introduction to Community Development, Theory, Practice, and Service-Learning*. California: Sage Publication, Inc.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Keerom dalam angka. Keerom: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Waris dalam angka 2014. Keerom: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. Data Indeks Pembangunan Manusia. Diambil 3 September 2014 dari www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=oCB0QFjAA&url=http://www.bps.go.id/ftab_sub%2Fview.php%2Ftabel%3D1%26daft
- Badan Pusat Statistik. *Ratio Gini*. Diambil 2 September 2014 dari http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=6.
- Blackshaw, T. (2010). *Key concept in community studies*. New Delhi: Sage Publication Pvt Ltd.
- Data Potensi Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana Kabupaten Keerom. Diambil 3 September 2014, dari http://www.keeromkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=60.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of qualitative research*. (Terjemahan Dariyanto, et.al). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ebewore, S. O. (2013). Knowledge sharing between farmer field school graduate farmers and other farmers on improved cocoa cultivation practices in edo state, nigeria. *Sustainable Agriculture Research Journal*, Vol 2, No. 2, pp 85-91.
- Ife, J. (1997). *Community development, creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Kuala Lumpur: Longman.
- Knowles, M., Holton III, E.F., & Swanson, R.A. (2005). *The adult learner*. London: Elsevier.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(1), 101 - 112.
doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360>

- Narayan, D. (2002). *Empowerment and poverty reduction, a sourcebook*. Washington DC: World Bank Publication.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ombati, A., et. al. (2010). *Technical manual farmer field school approach*. Sustainet EA documents. Diambil 20 September 2014 dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=oCC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fag%2Fca%2FCA-Publications%2FFarmer_Field_School_Approach.pdf&ei=Ml8cVL34G8y8uAS8_4CICA&usg=AFQjCNGxKyhxgNFyM_3em5l_GAaNCOfWHw&bvm=bv.75775273,d.c2E
- Samah, AA., & Aref F. (2009). Empowerment as an approach for community development in malaysia. *World Rural Observation Journal*, 1(2): 63-68.
- Saroni, M. (2012). *Orang miskin harus sekolah!*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan masyarakat, manifestasi kapasitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan upaya mewujudkannya dalam persektif masyarakat lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta.
- van den Berg, H. (2014). *IPM farmers field school, a synthesis of 25 impact evaluation*. Dokumen FAO. Diambil 20 September 2014 dari <http://www.fao.org/docrep/006/ad487e/ad487e02.htm>.
- Wesa, A., & Suryono, Y. (2014). Kesejahteraan ekonomi masyarakat peserta pelatihan kelompok prakoperasi di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(2), 149 - 159. doi:<http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2685>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat, wacana praktis*. Jakarta: Prenada Group.